



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Sektor Pariwisata Bisa Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi
Tanggal	: Jumat, 03 Oktober 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 3

Tok, DPR Sahkan UU Kepariwisataan

Sektor Pariwisata Bisa Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

Senayan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pariwisata menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Beleid baru ini diharapkan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

ANGGOTA Komisi VII DPR Novita Hardini mengatakan, regulasi ini bukan hanya sekadar produk hukum semata, tapi juga sebagai bentuk cinta bangsa Indonesia untuk mendorong kemajuan sektor pariwisata. RUU ini juga bisa menjadi instrumen penting dalam pembangunan bangsa dan sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

"Undang-undang ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto," harap Novita di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Novita berharap, beleid ini menjadi instrumen membahagiakan bagi daerah. Sebab bisa menjadi sumber PAD di tengah menurunnya alokasi transfer dari Pemerintah Pusat (Pempus) ke daerah. "Jadi pariwisata tak lagi hanya terpusat di kawasan ek-

onomi khusus, tapi bisa merata dan berkelanjutan di berbagai wilayah di Indonesia," harap politikus PDIP ini.

Selain itu, Novita mendorong agar ekosistem pariwisata melibatkan semua pihak, mulai dari Pemerintah Pusat (Pempus), daerah, swasta, hingga masyarakat setempat. Pariwisata berkelanjutan hanya bisa tercapai jika seluruh pemangku kepentingan bergotong royong, termasuk dalam menciptakan iklim investasi dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Lebih jauh, ia menyoroti soal kebocoran ekonomi di sektor pariwisata yang selama ini terjadi. Dengan adanya aturan baru ini, kebocoran tersebut bisa diminimalisir. "Kami ingin pariwisata menjadi sumber pendapatan yang sehat dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat sekitar," harap Novita.

Selain mendorong aspek ekonomi, UU Kepariwisataan juga mengatur perlindungan promosi pariwisata. "Ini penting agar Indonesia bisa bersaing dengan destinasi global," tandas Novita.

Anggota Komisi VII DPR Izzuddin Alqassam Kasuba menambahkan, UU Pariwisata ini bertujuan meningkatkan sektor ekonomi dan juga memperkuat nilai-nilai agama dan kebudayaan. "Mudah mudahan undang-undang ini ke depannya bisa menjadi acuan utama untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia," harapnya.

Ke depan, ia optimistis, destinasi pariwisata Indonesia akan semakin dikenal di kancah internasional sehingga memberikan dampak positif bagi perEkonomian nasional sekaligus mengedepankan jati diri bangsa. "Kita juga bisa mengembangkan destinasi wisata yang ada, sehingga destinasi itu menjadi lebih dikenal di kancah internasional," harap politikus PKS ini.

UU Pariwisata yang baru tambahnya, bisa membawa dampak baik bagi Indonesia. Karena akan terjadi peningkatan

wisatawan mancanegara, sehingga warga negara lain akan lebih tertarik untuk datang ke destinasi wisata di Indonesia.

Senada, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menjelaskan, revisi terhadap undang-undang tersebut dibutuhkan agar pembangunan pariwisata dilaksanakan secara lebih inklusif, berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal.

"UU Pariwisata yang baru secara tegas mengatur pariwisata berbasis masyarakat, pelestarian budaya, serta adaptasi terhadap tren global dan transformasi digital yang kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial," jelas Saleh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Saleh menilai, aspek yuridis dalam UU Kepariwisataan sebelumnya sudah tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas dan tantangan kepariwisataan. Perkembangan model pariwisata berkelanjutan, manajemen destinasi terpadu, mitigasi bencana, dan ekonomi digital, memerlukan kerangka hukum yang lebih kuat, adaptif, dan komprehensif.

"Undang-undang baru ini hadir untuk mengisi kekosongan hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan," kata politikus PAN ini.

Sementara, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, kepariwisataan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Sebab kepariwisataan memberikan kesempatan yang luas bagi tersedianya lapangan pekerjaan dan berkontribusi bagi perolehan devisa negara.

Penyelenggaraan pariwisata saat ini masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain degradasi lingkungan dan tergerusnya budaya lokal akibat pariwisata yang tidak terkendali dan akulturasi budaya dan wisatawan. "Atas dasar pertimbangan tersebut DPR dan Pemerintah sepakat untuk melakukan perubahan perbaikan dan penyempurnaan dasar terkait kebijakan kepariwisataan," kata Widiyanti di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. ■ TIF